Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

LKPJ
2024

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat: Jl. Sultan Agung Km 2 Pulosari Brebes, Telp(0283)6176465/Fax(0283)6176365

KODE POS 52213
BREBES

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKU) Pemerintah Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
T.A 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	6,10	23,51	15,05
2	Presentase Rumah Sehat Layak Huni	%	27,32	10,51	44,39
3	Presentase Akses Sanitasi Layak	%	100	100	100
4	Presentase Kepemilikan Sanitasi Layak	%	82,85	80	83,49
5	Persentase Penanganan Kawasan Rumah	%	21,28	52,07	28,72
6	Realisasi Luas Tanah yang disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	13,18	17	13,71

1. **Analisis kesesuaian antara program dengan target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.**

Berdasarkan TUPOKSI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah menetapkan Tujuan strategis yaitu : **Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat dan Menurunnya kawasan permukiman kumuh**. Guna mewujudkan Tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes menentukan Prioritas Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2026 yaitu :

a. **Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.**

Hasil dari Prioritas Sasaran tersebut dikontrol menjadi capaian tahunan. Adapun Capaian Indikator Kinerja Tujuan (IKU) di tahun 2024 dibandingkan terhadap Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan juga terhadap RENSTRA 2023-2026, adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Capaian untuk sasaran : Presentase Penurunan Kawasan Kumuh tahun 2024 adalah 15,05% dari target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 23,51% capaian tahun 2024 naik dibandingkan capaian tahun lalu (6,10%) dan Presentase Rumah Sehat Layak Huni Tahun 2024 adalah 44,39%, dibandingkan capaian tahun 2023 (27,32%) dengan target tahun 2023 (10,6%), Melihat hasil capaian yang masih dibawah target maka

diperlukan kerja keras dan penambahan anggaran agar kondisi sasaran dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKD) Pemerintah Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
T.A 2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Presentase Penurunan Kawasan Kumuh	%	6,10	23,51	15,05
2	Presentase Rumah Sehat Layak Huni	%	27,32	10,51	44,39
3	Presentase Akses Sanitasi Layak	%	100	100	100
4	Presentase Kepemilikan Sanitasi Layak	%	83,28	80	83,49
5	Persentase Penanganan Kawasan Rumah	%	21,28	52,07	28,72
6	Realisasi Luas Tanah yang disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	13,18	17	13,71

2. Analisis kesesuaian antara program dengan target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan TUPOKSI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah menetapkan Tujuan strategis yaitu : **Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat dan Menurunnya kawasan permukiman kumuh**. Guna mewujudkan Tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes menentukan Prioritas Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2026 yaitu :

b. Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Hasil dari Prioritas Sasaran tersebut dikontrol menjadi capaian tahunan. Adapun Capaian Indikator Kinerja Sasaran (IKD) di tahun 2024 dibandingkan terhadap Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan juga terhadap RENSTRA 2023-2026, adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Capaian untuk sasaran : Presentase Penurunan Kawasan Kumuh tahun 2024 adalah 15,05% dari target yang ditetapkan di tahun 2024 yaitu 23,51% capaian tahun 2024 naik dibandingkan capaian tahun lalu (6,10%), untuk Presentase Rumah Sehat

Layak Huni Tahun 2024 adalah 44,39%, dibandingkan capaian tahun 2023 (27,32%), Presentase Akses Sanitasi Layak adalah 100% dengan target 100% dengan target tahun 2023 (100%), Presentase Kepemilikan Sanitasi Layak adalah 83,49% dengan target 80% dibandingkan dengan tahun 2023 83,28%, Persentase Penanganan Kawasan Rumah adalah 28,72% dengan target 52,07% dibandingkan dengan tahun 2023 21,28%, Realisasi Luas Tanah yang disediakan Bagi Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya adalah 13,71% dengan target 17%. Melihat hasil capaian yang masih dibawah target maka diperlukan kerja keras dan penambahan anggaran agar kondisi sasaran dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
T.A 2024

NO	PERANGKAT DAERAH/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes	**%**	90	90,06
2	Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	95	91,4
3	Persentase akses sanitasi air limbah	%	80	83,49
4	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni di kawasan kumuh	%	2	1,7
5	Persentase Rumah Sehat Layak Huni dikawasan kumuh	%	11	11,71
6	Persentase Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Miskin	%	12	12,2
7	Persentase akses sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin	%	20	1,5
8	Persentase pemenuhan rumah sehat layak huni	%	23,51	44,39
9	Persentase Rumah Sehat Layak Huni	%	45	97,26
10	Persentase Penataan Kawasaan	%	97	28,72

3. Analisis kesesuaian antara program dengan target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan TUPOKSI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah menetapkan Tujuan strategis yaitu : **Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat dan Menurunnya kawasan permukiman kumuh**. Guna mewujudkan Tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes menentukan Prioritas Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2026 yaitu :

c. Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Hasil dari Prioritas Sasaran tersebut dikontrol menjadi capaian tahunan. Adapun Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah di tahun 2024 dibandingkan terhadap Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan juga terhadap RENSTRA 2023-2026, adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Capaian untuk sasaran : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes adalah 90,06% dengan target 90,07%, Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah 91,4% dengan target 95%, Persentase akses sanitasi air limbah adalah 83,49% dengan target 80%, Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni di kawasan kumuh adalah 1,7 dengan target 2%, Persentase Rumah Sehat Layak Huni dikawasan kumuh adalah 11,71% dengan target 11%, Persentase Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Miskin adalah 12,2% dengan target 12, Persentase akses sanitasi air limbah Bagi Masyarakat Miskin adalah 1,5% dengan target 20%, Persentase pemenuhan rumah sehat layak huni adalah 44,39% dengan target 23,51, Persentase Rumah Sehat Layak Huni adalah 97,26% dengan target 45%, Persentase Penataan Kawasaan adalah 28,7% dengan target 97%. Melihat hasil capaian yang masih dibawah target maka diperlukan kerja keras dan penambahan anggaran agar kondisi sasaran dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

Indikator keberhasilan atau kegagalan rumah layak huni dan kawasan kumuh adalah penting dalam mengevaluasi kualitas lingkungan tempat tinggal suatu populasi. Keberhasilan dalam menyediakan akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, listrik, serta infrastruktur dasar lainnya seperti jalan yang baik dapat meningkatkan standar rumah layak huni.Jika kondisi rumah memenuhi standar kebersihan dan keamanan, maka akan mengurangi risiko penyakit dan kecelakaan, Rumah yang layak huni memungkinkan individu dan keluarga untuk fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan diri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Banyak rumah yang tidak memenuhi standar karena keterbatasan finansial pemilik untuk melakukan perbaikan atau pembangunan kembali. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kondisi rumah yang layak huni serta kurangnya penegakan hukum terhadap pemilik rumah yang tidak memenuhi standar, dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai target.

Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat dapat menyebabkan kegagalan dalam mengimplementasikan program perbaikan kawasan kumuh. Meskipun program fisik dapat dilaksanakan, perubahan sosial ekonomi dalam kawasan kumuh mungkin lambat, terutama jika tidak ada program yang berfokus pada pendidikan, pelatihan kerja, atau pengembangan ekonomi lokal. Keberhasilan dalam merencanakan dan melaksanakan program rehabilitasi kawasan

kumuh dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan standar hidup penduduk, Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal mereka.

Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas indikator ini untuk memastikan bahwa upaya untuk menciptakan rumah layak huni dan mengatasi kawasan kumuh benar-benar berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Capaian Kinerja Program Pembangunan

Capaian Indikasi Rencana Program Prioritas
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
T.A 2024

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes	%	90,66	90	90,06
2	Meningkatnya Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Untuk Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat Miskin	%	10,25	6	12,2
3	Meningkatnya Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Untuk Akses Sanitasi Layak	%	84,08	80	83,49
4	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni Di Kawasan Kumuh	%	86,90	80	89,88
5	Terpenuhiny a Kebutuhan Rumah Sehat Layak Huni	%	95	94	97,26
6	Meningkatnya Rumah Sehat Layak Huni dikawasan kumuh	%	86,90	80	89,88
7	Menurunnya Luas Permukiman Kumuh	Ha	30,5	12	61,63
8	Meningkatnya Rumah Sehat Layak Huni	%	95	45	97,26
9	Menurunnya Luas Permukiman Kumuh	Ha	471	445,81	409,51
10	Rumah Sehat Layak Huni Yang Tertangani	Unit	61	80	33
11	Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	%	110,34	80	100
12	Presentase Jumlah Kasus Yang Tertangani	%	100	95	50
13	Presentase Tanah Yang Bersertifikat	%	118,3	80	100

4. Analisis kesesuaian antara program dengan target indikator sasaran yang sudah ditetapkan.

Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat dan menurunnya kawasan permukiman kumuh, perlu dievaluasi sejauh mana program-program yang ada mendukung pencapaian target tersebut. Berikut adalah analisis kesesuaian antara

program-program dengan target indikator sesuai sasaran. Program ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan memberikan subsidi kepada individu atau keluarga yang memenuhi syarat untuk membeli atau menyewa rumah. Program ini fokus pada perbaikan dan pemeliharaan rumah yang sudah ada agar memenuhi standar rumah layak huni, sehingga meningkatkan jumlah rumah yang layak huni dalam masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan akses jalan juga merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan penyediaan rumah layak huni. Program ini bertujuan untuk merenovasi atau memperbaiki kawasan permukiman kumuh agar memenuhi standar yang lebih tinggi, termasuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Dalam beberapa kasus, relokasi penduduk dari kawasan kumuh ke perumahan baru yang lebih layak dapat membantu mengurangi kepadatan dan meningkatkan kondisi lingkungan.

Program-program tersebut secara keseluruhan sesuai dengan target indikator sasaran yang telah ditetapkan. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat akan mendukung penurunan kawasan permukiman kumuh dengan memberikan alternatif tempat tinggal yang lebih baik bagi penduduk yang tinggal di kawasan kumuh. Program rehabilitasi rumah dan kawasan kumuh, serta pembangunan infrastruktur dasar, memiliki kesesuaian yang baik dengan target meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan menurunkan kawasan permukiman kumuh, karena mereka secara langsung mempengaruhi kondisi fisik rumah dan lingkungan tempat tinggal. Penting juga untuk memastikan bahwa program-program ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan TUPOKSI Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah menetapkan Tujuan strategis yaitu : **Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat dan Menurunnya kawasan permukiman kumuh**. Guna mewujudkan Tujuan tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes menentukan Prioritas Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 s/d 2026 yaitu :

d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Hasil dari Prioritas Sasaran tersebut dikontrol menjadi capaian tahunan. Adapun Capaian Indikasi Rencana Program Prioritas di tahun 2024 dibandingkan terhadap Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) 2024 dan juga terhadap RENSTRA 2023-2026, adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya jumlah rumah layak huni dan menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.

Capaian untuk sasaran : Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah 91,4% dengan target 95%, Persentase akses sanitasi air

limbah adalah 83,49% dengan target 80%, Persentase Rumah Sehat Layak Huni adalah 97,26% dengan target 45%, Persentase Penataan Kawasaan adalah 28,72% dengan target 97%. Melihat hasil capaian yang masih dibawah target maka diperlukan kerja keras dan penambahan anggaran agar kondisi sasaran dapat mencapai target yang telah di tetapkan.

5. Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes			
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.
	Output Kegiatan	:	Jumlah Kepala Keluarga yang terlayani septik skala individual dan IPAL skala permukiman.
	Outcome Kegiatan	:	Masyarakat terlayani septik skala individual dan IPAL skala permukiman.
	Tujuan Program	:	Meningkatkan akses layanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman.
	Dampak Program	:	Meratanya layanan sanitasi dan air limbah domestik di kabupaten brebes.
	Manfaat Program	:	Terwujudnya masyarakat berbudaya hidup sehat.
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	b. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD. d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD. f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	Output Kegiatan	:	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Terwujudnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.

			f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
	Output Kegiatan	:	Laporan dan Fasilitas Adminstrasi Keuangan SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Layanan administrasi keuangan dan umum dengan baik.
	d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
	Output Kegiatan	:	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana.
	Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
	e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya dan Tercukupinya Administrasi Kepegawaian SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
	f. Administrasi Umum Perangkat Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan g. Fasilitasi Kunjungan Tamu. h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya dan Terfasilitasinya Administrasi Umum SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Optimal dan Meningkatnya Pelayanan SKPD.
	g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Pengadaan Mebel b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya Pengadaan SKPD
	Outcome Kegiatan	:	Meningkatknya dan Tercapainya Kegiatan SKPD.
	h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya dan Terpenuhinya Kebutuhan kegiatan SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Optimal dan Meningkatknya Kegiatan SKPD.
	i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

			c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
	Output Kegiatan	:	Terpeliharanya fasilitas di SKPD.
	Outcome Kegiatan	:	Optimal dan Meningkatnya Kegiatan SKPD.
	Tujuan Program	:	Terpenuhinya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan pelayanan yang sesuai standar
	Dampak Program	:	Meningkatnya Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
	Manfaat Program	:	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
3.	Program Pengembangan Perumahan.		
	j. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani. b. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya rehabilitasi rumah bagi korban bencana
	Outcome Kegiatan	:	Rumah bagi korban bencana terehabilitasi
	k. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya Identifikasi rumah di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi.
	Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi.
	l. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. b. Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota.
	Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Rumah bagi Korban Bencana.
	m. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.		
	Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya Pengelolaan /Pemeliharaan Rumah susun umum dan atau Rumah khusus.
	Outcome Kegiatan	:	Terpenuhinya Pengelolaan /Pemeliharaan Rumah susun umum dan atau Rumah khusus.
	n. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.		
	Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
	Output Kegiatan	:	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan.
	Outcome Kegiatan	:	Pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.
	Tujuan Program	:	Memberikan rumah bagi korban bencana terehabilitasi dan pengendalian pembangunan pengembangan perumahan.
	Dampak Program	:	Terlaksananya pembangunan perumahan rakyat bersubsidi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

	Manfaat Program	:	Meningkatnya pembangunan bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan.
4.	Program Kawasan Permukiman.		
	o. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.		
	Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya koordinasi dan sikronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh.
	Outcome Kegiatan	:	Kawasan permukiman kumuh berkurang.
	p. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh b. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.
	Output Kegiatan	:	Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
	Outcome Kegiatan	:	Masyarakat memahami pentingnya mejaga lingkungan agar tidak menjadi kumuh.
	q. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.		
	Sub Kegiatan	:	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
	Output Kegiatan	:	Terlaksananya Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki.
	Outcome Kegiatan	:	Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
5.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.		
	r. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
	Output Kegiatan	:	Jumlah rumah tidak layah huni yang diperbaiki dan Kepala Keluarga yg terdampak relokasi.
	Outcome Kegiatan	:	Rumah tidak layah huni berkurang dan masyarakat korban relokasi memperoleh bantuan uang sewa rumah tinggal.
	Tujuan Program	:	Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh untuk mendukung terwujudnya permukiman yang produktif dan berkelanjutan.
	Dampak Program	:	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	Manfaat Program	:	Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik.
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).		
	s. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
	Output Kegiatan	:	Jumlah Perumahan dan permukiman yang terlayani.
	Outcome Kegiatan	:	PSU di perumahan dalam kondisi baik.
	Tujuan Program	:	Meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi MBR.
	Dampak Program	:	Terlaksananya kelancaran dan ketertiban pelayanan umum.

	Manfaat Program	:	Terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.
7.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.		
	t. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
	Output Kegiatan	:	Jumlah Penyelesaian Tanah yang difasilitasi.
	Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah.
	Tujuan Program	:	Meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing – masing pihak.
	Dampak Program	:	Terlaksananya identifikasi, monitoring dan penanganan permasalahan urusan pertanahan.
	Manfaat Program	:	Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
8.	Program Penatagunaan Tanah.		
	u. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.		
	Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.
	Output Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Kegiatan Lahan/Tanah.
	Outcome Kegiatan	:	Terlaksananya kegiatan pembangunan penatagunaan tanah.
	Tujuan Program	:	Tersusunnya data angka (kuantitas) perubahan penggunaan lahan/tanah di Kabupaten/Kota.
	Dampak Program	:	Terlaksananya tata kelola aset pemda khususnya bidang pertanahan.
	Manfaat Program	:	Memudahkan pengelolaan data bidang pertanahan.

6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

T.A 2024

NO	INSTANSI	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.000.000	56.153.000	112,31

Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

T.A 2024

NO	URUSAN	BELANJA		(%)
		ANGGARAN	REALISASI	
	Belanja Operasi	22.364.272.008	21.487.390.839	96,08
	Belanja Modal	25.866.956.000	24.739.699.185	95,64
	JUMLAH	**48.231.228.008**	**46.227.090.024**	**95,84**

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

T.A 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
I	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**7.151.209.007**	**7.102.328.500**	**99,3%**
1	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*7.151.209.007*	*7.102.328.500*	*99,32%*
1.1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.151.209.007	7.102.328.500	99,32%
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**7.157.835.242**	**6.546.072.632**	**91,45%**
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*201.950.000*	*180.752.915*	*89,50%*
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.984.900	99,85%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000	9.999.600	100%
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	9.701.333	97,01%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000	9.999.600	100%
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.300.000	49.554.482	73,63%
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.650.000	81.513.000	96,29%
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*4.204.596.983*	*3.730.248.867*	*88,72%*
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.972.138.000	3.499.242.551	88,09%
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	185.314.983	184.198.116	99,40%
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.194.000	8.139.600	99,34%
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.500.000	20.244.000	98,75%
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.450.000	8.449.800	100%
2.6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	10.000.000	9.974.800	99,75%
3	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*30.000.000*	*28.221.600*	*94,07%*
3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	18.232.700	91,16%
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	4.750.000	94,29%
4	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*54.350.000*	*47.790.000*	*87,93%*

4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.350.000	47.790.000	87,93%
5	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*504.451.200*	*474.624.587*	*94,09%*
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.999.600	100%
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.852.600	154.223.522	97,00%
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.995.600	29.724.119	99,09%
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.600.000	64.305.557	96,55%
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	24.001.500	96,01%
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.998.000	29.968.000	99,90%
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.005.000	157.402.289	87,44%
6	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*348.066.000*	*334.712.000*	*96,16%*
6.1	Pengadaan Mebel	51.216.000	51.204.000	99,98%
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	296.850.000	283.508.000	95,51%
6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*965.146.000*	*918.029.632*	*95,12%*
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	20.000.000	100%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.574.000	152.739.172	90,07%
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	775.572.000	745.290.460	96,10%
7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*849.275.059*	*831.693.031*	*97,93%*
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.975.059	207.730.811	98,46%
7.2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	218.300.000	208.141.220	95,35%
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.000.000	415.821.000	99,01%
III	**Program Pengembangan Perumahan**	**974.889.407**	**876.044.708**	**89,86%**
1	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*142.965.843*	*126.797.750*	*88,69%*
1.1	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	78.869.913	75.417.250	95,62%
1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	64.095.930	51.380.500	80,16%
2	*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*59.321.948*	*57.317.760*	*96,62%*
2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	59.321.948	57.317.760	96,62%
3	*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau*	*462.757.740*	*410.669.334*	*88,74%*

	Relokasi Program Kabupaten/Kota			
3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	411.743.678	405.594.334	98,51%
3.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	51.014.062	5.075.000	9,95%
4	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*122.199.981*	*97.734.864*	*79,98%*
4.1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	122.199.981	97.734.864	79,98%
5	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	*187.643.895*	*183.525.000*	*97,80%*
5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	187.643.895	183.525.000	97,80%
IV	**Program Kawasan Permukiman**	**18.586.669.260**	**18.154.005.745**	**97,67%**
1	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	*84.000.000*	*78.657.000*	*93,64%*
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	84.000.000	78.657.000	93,64%
2	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	*13.794.000.000*	*13.382.593.745*	*97,02%*
2.1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	13.644.000.000	13.236.619.245	97,01%
2.2	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	150.000.000	145.974.500	97,32%
3	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*4.708.669.260*	*4.692.755.000*	*99,66%*
3.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.708.669.260	4.692.755.000	99,66%
V	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	**611.625.092**	**576.431.999**	**94,25%**
1	*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*	*611.625.092*	*576.431.999*	*94,25%*
1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	611.625.092	576.431.999	94,25%
VI	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**10.720.000.000**	**10.328.063.400**	**96,34%**
1	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	*10.720.000.000*	*10.328.063.400*	*96,34%*
1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.720.000.000	10.328.063.400	96,34%
VII	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**1.965.000.000**	**1.920.005.040**	**97,71%**

1	*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*1.965.000.000*	*1.920.005.040*	*97,71%*
1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.965.000.000	1.920.005.040	97,71%
VIII	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**1.064.000.000**	**724.138.000**	**68,06%**
1	*Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	*1.064.000.000*	*724.138.000*	*68,06%*
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.064.000.000	724.138.000	68,06%

7. Penghargaan yang didapat di tahun 2023 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional). ***(NIHIL)***

A. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH.**	**Meningkatnya Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Untuk Akses Sanitasi Layak.**	**100%**	**100%**		
1				*PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.*	*Jumlah Presentase Rumah Tangga Yang Terfasilitasi Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah.*	*100%*	*100%*		
1.1				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar.	1440 Rumah Tangga	1440 Rumah Tangga		
II	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**	**Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Brebes.**	**100%**	**100%**		
1				*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.*	*Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia.*	*100%*	*100%*		
1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	3 Dokumen	3 Dokumen		
1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	4 Dokumen	4 Dokumen		
1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	4 Dokumen	4 Dokumen		

					Dokumen Perubahan RKA-SKPD.				
1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	4 Dokumen	4 Dokumen		
1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	4 Dokumen	4 Dokumen		
1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	24 Laporan	24 Laporan		
1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2 Laporan	2 Laporan		
2				*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.*	*Persentase Kehadiran Pegawai.*	*100%*	*100%*		
2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	31 Orang/Bulan		
2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dokumen	550 Dokumen		
2.3				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen		
2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
2.5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan		
2.6				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen		

3				*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang berkualitas*	*100%*	*100%*		
3.1				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan		
3.2				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan		
4				*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.*	*Persentase pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.*	*100%*	*100%*		
4.1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.	75 Paket	75 Paket		
5				*Administrasi Umum Perangkat Daerah.*	*Persentase Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor.*	*100%*	*100%*		
5.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket		
5.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	60 Paket	60 Paket		
5.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan.	40 Paket	40 Paket		
5.4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan.	8 Paket	8 Paket		
5.5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan.	10 Paket	10 Paket		
5.6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.	14 Dokumen	14 Dokumen		
5.7				Fasilitasi Kunjungan Tamu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.	4 Laporan	4 Laporan		
5.8				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah.	720 Laporan	720 Laporan		
6				*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*	*Persentase Aset dalam kondisi baik.*	*100%*	*100%*		

6.1				Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	14 Unit		
6.2				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		
7				*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor.*	*100%*	*100%*		
7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Buah	500 Buah		
7.2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan		
7.3				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40 Laporan	40 Laporan		
8				*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.*	*Persentase Aset dalam kondisi baik.*	*100%*	*100%*		
8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	30 Unit	30 Unit		
8.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik.	30 Unit	30 Unit		
8.3				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik.	2 Unit	2 Unit		
III	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**		**Program Pengembangan Perumahan.**	**Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani.**	**%**	**%**		
9				*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase Unit Penyediaan dan. Rehabilitasi Rumah Korban.*	*100%*	*100%*		
9.1				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian	1 Dokumen	1 Dokumen		

				Sebelumnya yang Belum Tertangani	Sebelumnya yang Belum Tertangani				
9.2				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen		
10				*Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Persentase korban bencana atau relokasi yang mengikuti sosialisasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program*	*100%*	*100%*		
10.1				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	195 Orang	195 Orang		
11				*Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	*Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani*	*100%*	*100%*		
11.1				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	32 Unit Rumah	32 Unit Rumah		
11.1				Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	25 Unit Rumah	25 Unit Rumah		
12				*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan*	*100%*	*100%*		
12.1				Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	100 Laporan	100 Laporan		
13				*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	*Terbitnya Izin Pembangunan Pengembangan Perumahan*	*100%*	*100%*		
13.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	22 Laporan	22 Laporan		

IV	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**		**Program Kawasan Permukiman.**	**Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh.**	**43,24 Ha**	**43,24 Ha**		
14				*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.*	*Persentase Kawasan Kumuh Yang Tertangani.*	*100%*	*100%*		
14.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	8 Laporan	8 Laporan		
15				*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) HA*	*Jumlah Kawasan Kumuh Yang Terfasilitasi Penataan dan Kualitas.*	*80%*	*80%*		
15.1				Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	50 Laporan	50 Laporan		
15.2				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP.	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen	3 Dokumen		
16				*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*	*Jumlah Rumah Sehat Layak Huni Yang Terbangun Di Kawasan Kumuh*	*78%*	*78%*		
16.1				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	295 Unit Rumah	295 Unit Rumah		
V	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**		**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.**	**Rumah Sehat Layak Huni Yang Tertangani.**	**33 Unit**	**33 Unit**		
17				*Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.*	*Jumlah Unit Rumah MBR Yang Terbangun Di Kawasan Kumuh.*	*94,75%*	*94,75%*		

17.1				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	3 Desa	3 Desa		
VI	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.**		**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).**	**Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.**	**70%**	**95%**		
18				*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.*	*Tersedia PSU Perumahan.*	*70%*	*95%*		
18.1				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian.	8 Lokasi	10 Lokasi		
VII	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN.**		**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.**	**Persentase tanah yang bersertifikat.**	**95%**	**95%**		
19				*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.*	*Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Daerah Yang Disertifikasi.*	*1 Kasus*	*1 Kasus*		
19.1				Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	950 Dokumen	950 Dokumen		
VIII	**DINPERWASKIM**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN.**		**Program Penatagunaan Tanah.**	**Persentase tanah yang bersertifikat.**	**75%**	**75%**		
20				*Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.*	*Presentase Penggunaan Lahan Sesuai Dengan Tata Ruang*	*75%*	*75%*		

20.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.	80 Dokumen	80 Dokumen		

Brebes, 07 Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Brebes

Dani Asmoro, S.T., M.T.
Pembina Tk.I – IV/b
NIP. 19791011 200604 1 010